



## **IMPLEMENTASI PROGRAM PADAT KARYA DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI KECAMATAN PABEAN CANTIAN KOTA SURABAYA**

**Shinta Rahmawati, Maria Margaretha, Poetri Andera,**

**Fayola Nur Khasia Arbain, Oktarizka Reviandani**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik,

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Program Padat Karya dalam menurunkan angka kemiskinan di Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, dengan menggunakan model implementasi kebijakan dari David C. Korten. Fokus penelitian mencakup tiga hal, yaitu kesesuaian program, kapasitas organisasi pelaksana, dan ketepatan kelompok sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Padat Karya telah sesuai dengan kebutuhan awal masyarakat dan tepat sasaran, khususnya bagi warga miskin yang memiliki keterampilan usaha. Namun, efektivitas program masih terkendala oleh lemahnya pendampingan usaha, minimnya pelatihan, keterbatasan modal lanjutan, dan kurangnya strategi pemasaran. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi pelaksana serta evaluasi pasca pemberian bantuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, penyediaan pelatihan dan modal berkelanjutan, serta fasilitasi akses pasar agar program dapat memberikan dampak jangka panjang yang optimal.

**Kata Kunci:** Program Padat Karya, Kemiskinan, Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Ekonomi.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal (Hardinandar, 2019). Salah satu ukuran kondisi sosial dan ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan pemerintah di suatu daerah adalah adanya kemiskinan itu sendiri (Oktaviana et al., 2021). Kota Surabaya termasuk dalam Ibukota Provinsi Jawa Timur, meskipun menjadi kota besar dan maju, Surabaya masih banyak terdapat masalah – masalah sosial di dalamnya yang berdampak pada kemajuan perekonomian. Surabaya merupakan salah satu kota yang memiliki tingkat kemiskinan di atas 30% dari jumlah penduduknya (Ramadhan, 2022), tingkat pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat, hal ini diperkuat dengan proyeksi penduduk pada tahun 2023 di Surabaya berjumlah 2.997.547 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya hingga 2030 (Masduki, 2023). Jumlah penduduk miskin di Surabaya mengalami penurunan, yang menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi kemiskinan telah diterapkan dengan efektif (Ummah et al., 2023). Namun, masih terdapat peningkatan angka kemiskinan di beberapa kecamatan, seperti yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1 Data Penduduk Miskin Surabaya Berdasarkan Kecamatan Per Tahun 2025**

| Kecamatan     | Miskin (Jiwa) | Pra Sejahtera (Jiwa) |
|---------------|---------------|----------------------|
| Tambaksari    | 4.846         | 27.452               |
| Wonokromo     | 5.041         | 10.141               |
| Sukomanunggal | 1.138         | 12.303               |
| Semampir      | 8.033         | 31.642               |
| Gubeng        | 1.221         | 9.932                |
| Simokerto     | 3.723         | 11.640               |
| Sawahan       | 5.098         | 29.116               |
| Tegalsari     | 5.746         | 10.660               |
| Krembangan    | 6.785         | 10.885               |
| Kenjeran      | 4.318         | 17.298               |

|                  |       |        |
|------------------|-------|--------|
| Genteng          | 1.077 | 11.374 |
| Wonocolo         | 2.578 | 4.902  |
| Sukolilo         | 2.408 | 8.159  |
| Dukuh Pakis      | 1.414 | 3.766  |
| Pabean Cantian   | 3.392 | 15.055 |
| Bubutan          | 709   | 15.822 |
| Karang Pilang    | 2.658 | 6.931  |
| Sambikerep       | 2.476 | 4.730  |
| Asem Rowo        | 433   | 2.552  |
| Mulyorejo        | 717   | 7.842  |
| Bulak            | 265   | 2.832  |
| Wiyung           | 572   | 4.448  |
| Rungkut          | 59    | 8.463  |
| Tenggilis Mejoyo | 232   | 3.461  |
| Tandes           | 4     | 5.359  |
| Jambangan        | 1.608 | 2.959  |
| Pakal            | 762   | 2.551  |
| Gunung Anyar     | 122   | 862    |
| Gayungan         | 211   | 3.305  |
| Lakarsantri      | 382   | 4.739  |
| Benowo           | 215   | 1.438  |

Sumber: pemerintahan.surabaya.go.id

Berdasarkan data diatas, jumlah total penduduk miskin di Kota Surabaya mencapai 68.822 jiwa. Jumlah ini merupakan akumulasi dari data di seluruh 31 kecamatan yang ada. Jika dihitung secara rata-rata, setiap kecamatan memiliki sekitar 2.220 jiwa penduduk miskin. Namun, dari keseluruhan kecamatan tersebut, Kecamatan Pabean Cantian menunjukkan angka kemiskinan yang cukup tinggi, yaitu sebesar

3.392 jiwa, atau sekitar 53% lebih tinggi dibandingkan rata-rata. Hal ini menempatkan Pabean Cantian sebagai salah satu kecamatan dengan tingkat kemiskinan yang mencolok. Kecamatan Pabean Cantian adalah salah satu kecamatan dengan penduduk terpadat di Surabaya, di mana mayoritas penduduk merupakan pendatang dari Madura, memiliki sumber daya manusia yang rendah, dan kondisi ekonomi yang masih lemah (BKKBN, 2017).

Program Padat Karya merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Program ini bertujuan untuk mendorong perekonomian masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, permodalan, dan teknologi, khususnya bagi penduduk miskin. Program padat karya tidak hanya berfokus pada sektor konstruksi, tetapi juga melibatkan sector pertanian, pariwisata, dan lingkungan hidup (Kurnia, 2024). Masyarakat memiliki peran utama dalam pelaksanaan Program Padat Karya, baik sebagai penerima manfaat maupun kolaborator. Beberapa keluarga di Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, menolak di data ulang Program Padat Karya karena sejumlah alasan yang berkaitan dengan kondisi pribadi dan preferensi mereka. Beberapa keluarga menolak di data ulang dalam program ini karena alasan pribadi, seperti anggota keluarga yang baru saja melahirkan, sehingga mereka lebih memilih untuk mengurus rumah tangga dan anak daripada terlibat dalam pekerjaan padat karya. Ada kecenderungan di antara beberapa keluarga untuk lebih memilih bantuan tunai daripada program yang mengharuskan mereka bekerja. Mereka merasa lebih aman dan nyaman menerima bantuan uang daripada berpartisipasi dalam program yang memerlukan usaha aktif. Adapun keluarga miskin yang menjadi sasaran program ternyata sudah memiliki pekerjaan, meskipun penghasilan mereka masih di bawah Rp4 juta per bulan. Terdapat juga masalah dalam hal sosialisasi mengenai manfaat dan tujuan dari Program Padat Karya. Banyak warga yang tidak sepenuhnya memahami bagaimana program ini dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan, sehingga mereka cenderung menolak (redaksibso, 2023).

Dalam proses implementasi kebijakan, terdapat berbagai faktor yang dapat menjadi pendorong maupun penghambat. Faktor-faktor ini menentukan sejauh mana suatu kebijakan dapat

dijalankan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Menurut David C. Korten dalam Bahri (2020), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu program, pelaksanaan program dan kelompok sasaran.

Peneliti mengambil penelitian terdahulu yang dituliskan oleh Yovita Rahma Nurzelanti, M. Kendry Widiyanto, Dida Rahmadanik, 2024. Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Program Padat Karya di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program padat karya di Kecamatan Gubeng telah sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam implementasi yaitu minimnya minat masyarakat terhadap program padat karya. Oleh karena itu, pemerintah Kecamatan Gubeng diharapkan lebih gencar dalam memberikan informasi terkait program padat karya melalui media sosial dengan tujuan meningkatkan minat masyarakat (Nurzelanti et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan di balik penolakan masyarakat terhadap program padat karya di Kecamatan Pabean Cantian, baik karena kurangnya sosialisasi, ketidakpercayaan terhadap efektivitas program, maupun faktor sosial ekonomi lainnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untum mengetahui bagaimana dampak penolakan tersebut memengaruhi keberhasilan implementasi program dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, penelitian akan mengkaji hambatan yang dihadapi pemerintah serta persepsi masyarakat terhadap manfaat program, dengan tujuan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi dan penerimaan masyarakat terhadap program padat karya di wilayah tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan publik pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta tuntutan para aktor kebijakan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu program kerja, pemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan pendukung agar dapat diimplementasikan secara efektif dalam masyarakat (Syahrudin, 2019). Dalam proses implementasi kebijakan, terdapat berbagai faktor yang dapat menjadi pendorong maupun penghambat. Faktor-faktor ini menentukan sejauh mana suatu kebijakan dapat dijalankan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan (Siregar, 2022). Menurut David C. Korten dalam Bahri (2020), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu program itu sendiri, proses pelaksanaan program dan kelompok sasaran program.

Menurut Korten, keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada keselarasan ketiga unsur tersebut. Pertama, perlu adanya kecocokan antara program dan penerima manfaat, yakni antara apa yang ditawarkan oleh program dan kebutuhan kelompok sasaran. Kedua, keselarasan antara program dan organisasi pelaksana, yaitu antara tuntutan program dan kapabilitas organisasi yang menjalankannya. Ketiga, harus ada kesesuaian antara penerima manfaat dan organisasi pelaksana, dalam arti bahwa syarat yang ditetapkan oleh organisasi untuk mengakses hasil program harus sesuai dengan kemampuan kelompok sasaran untuk memenuhinya.

Program Padat Karya Surabaya adalah program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Surabaya. Program ini juga bertujuan untuk menambah kesempatan kerja, mendukung perekonomian lokal, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Program Padat Karya di Surabaya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan peluang usaha di berbagai

kecamatan. Langkah pertama dalam program ini adalah memetakan potensi ekonomi di setiap wilayah guna mengidentifikasi sektor usaha yang dapat dikembangkan. Setelah itu, dilakukan sosialisasi kepada warga sekaligus menjaring mereka yang berminat untuk terlibat. Program ini menyediakan pelatihan keterampilan sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan. Selain mendapatkan pembekalan pengetahuan dan keterampilan juga difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang mendukung agar usaha mereka dapat berkembang (Izzah & Hertati, 2024).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji implementasi Program Padat Karya di Kecamatan Pabean, meliputi pelaksanaan, tantangan, dan dampaknya. Menurut Bog dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, serta perilaku yang diamati, dengan pendekatan holistik terhadap kelompok dan individu. Pendekatan studi kasus merupakan penelitian mendalam terhadap individu, kelompok, organisasi, atau program dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh pemahaman menyeluruh yang kemudian dianalisis untuk mengembangkan teori (Abdussamad, 2021). Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya. Fokus penelitian ini terletak pada pemahaman dan analisis terhadap implementasi program padat karya sebagai salah satu strategi pemerintah dalam mengurangi jumlah Keluarga Miskin di Daerah dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin di Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, khususnya dalam membuka peluang kerja dan faktor penolakan masyarakat pada program.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak kelurahan Tanjung Perak dan Krembangan Utara. Selain itu, peneliti

mengumpulkan data dokumentasi menggunakan studi Pustaka berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya tentang program padat karya. Menurut teori penelitian kualitatif Siyoto dan Sodik (2015), Data primer mengacu pada data lisan atau tertulis yang dirangkum secara jelas dan ringkas, serta grafik dan tabel yang dihasilkan dari materi yang sudah terpercaya. Dalam hal ini subjek penelitiannya adalah variabel informan yang akan diteliti oleh peneliti. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber dokumen atau arsip grafis seperti (tabel, catatan, notulen rapat, dan lain-lainnya) yang dapat memperkuat hasil data yang akan di relevansinya evaluasi pemerintah Kota Surabaya dalam Implementasi Program Padat Karya dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yg dimaksud ialah informan yg terlibat pribadi atau informan yang diklaim memiliki kemampuan serta mengerti permasalahan terkait implementasi Program Padat Karya Kecamatan Pabean Cantian. Pemilihan informan dalam penelitian ini, diperoleh dengan melakukan kegiatan wawancara pada beberapa informan, antara lain yaitu Bapak Eko Sudjarwoko, selaku Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kecamatan Pabean Cantian. Ibu Umi selaku Seksi Kesejahteraan Rakyat dikelurahan Tanjung Perak dan Bapak Hariyanto Seksi Kesejahteraan Rakyat dikelurahan Krembangan Utara. Pada penelitian ini, analisis data menggunakan model interaktif dari Miles & Huberman yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Program**

Menurut Korten, penting adanya kesesuaian antara program yang dirancang

dengan kebutuhan para penerima manfaat sebagai sasaran utama. Artinya, yang ditawarkan oleh program harus relevan dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, program memiliki tiga aspek utama yang menjadi fokus, yaitu perencanaan, penetapan tujuan, dan penyusunan anggaran (Andani, Setyowati, & Amin, 2019). Program tersebut dievaluasi berdasarkan sejauh mana rencana dan tujuannya mampu menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kelurahan Tanjung Perak dan Krembangan Utara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak kelurahan tanjung perak, mendapatkan hasil bahwa program padat karya di kelurahan tersebut telah berjalan dengan baik, memiliki perencanaan serta tujuan yang jelas, dimana wawancara yang dilakukan dengan pihak kelurahan Tanjung Perak, mendapatkan hasil:

“ ...padat karya yang ada di tanjung perak sudah lancar, jadi ada penurunan warga miskin yang lumayan banyak di kelurahan tanjung perak. Program padat karya ini dari pemerintah kota membekali adanya modal berbentuk rombong...” (hasil wawancara 22 april 2025).

Monitoring juga dilakukan oleh staf Kesra setiap bulan untuk mengevaluasi perkembangan penerima bantuan program. Keberhasilan terlihat dari meningkatnya pendapatan warga dan penurunan kategori miskin ekstrim. Meskipun dalam mencapai tujuan program telah sesuai dengan kebutuhan warga, karena mampu membuka peluang kerja baru dan mengentaskan kemiskinan, akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan, diantaranya mengenai terkendala transportasi dan modal anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dukungan sumber daya tambahan tetap diperlukan untuk keberlanjutan program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kelurahan Krembangan

Utara, program Padat Karya telah berjalan dengan beberapa jenis usaha, di antaranya potong rambut dan penjualan makanan melalui rombongan. Meskipun ada juga usaha pembibitan atau hidroponik, rombongan menjadi yang paling banyak berjalan dan dipantau oleh pihak terkait, Dimana wawancara yang dilakukan dengan pihak kelurahan Krembangan Utara, mendapatkan hasil:

*“...Bantuan dari program padat karya di sini sebagian besar berbentuk rombongan beserta perlengkapan seperti wajan, piring, dan minyak. Bantuan itu diberikan kepada warga yang memang sudah jualan tapi kendalanya di modal atau alat yang kurang memadai. Jadi kami berikan untuk mendukung usaha mereka...”*(hasil wawancara 3 juni 2025).

Perencanaan program ini, dilakukan secara kolaboratif dengan kader Surabaya Hebat (KSH), RT/RW, serta Kesra kelurahan. Anggaran untuk program ini tidak berasal dari kelurahan, melainkan langsung dari program pemerintah, Kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga terlihat dalam program ini, di mana mereka memberikan dukungan dalam bentuk rombongan dan modal. Proses sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui pelatihan, dan harus memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki keterampilan dan status ekonomi yang memadai.

Namun, meskipun program ini sudah menjangkau sasaran yang tepat dan sesuai kebutuhan, terdapat kendala serius dalam pelaksanaan, yaitu keterbatasan modal lanjutan dan lemahnya kemampuan pengelolaan usaha oleh penerima manfaat. Banyak rombongan yang mangkrak akibat modal habis atau digunakan untuk kebutuhan lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program sudah dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, daya dukung keberlanjutan program masih lemah. Penting juga memperhatikan strategi pasar untuk memperkuat dampak jangka panjang program pemberdayaan (Krisnandika et al., 2021).

## 2. Organisasi Pelaksana

Menurut Korten, kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana merujuk pada kecocokan antara tuntutan tugas dari program dengan kapasitas organisasi yang melaksanakannya. Organisasi pelaksana memegang peranan penting karena bertanggung jawab atas keberlangsungan program selama proses pelaksanaannya. Dalam aspek organisasi pelaksana ini, terdapat dua poin utama yang menjadi perhatian, yaitu keberadaan tim pelaksana yang menjalankan program padat karya serta tersedianya prosedur yang mengatur pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak kelurahan Tanjung Perak, mendapatkan hasil:

*“... setiap bulan dari staff kesra melakukan monitoring, perkembangannya bagaimana terus penghasilannya bagaimana...”*(hasil wawancara 22 april 2025)

Fungsi koordinasi dan pengawasan dari program di kelurahan tanjung perak telah berjalan secara aktif. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas organisasi pelaksana cukup memadai. Keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada pembagian tugas dan koordinasi yang baik. Namun, beberapa kendala masih dihadapi seperti keterbatasan akses modal tambahan dan logistik yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas teknis dan akses permodalan menjadi rekomendasi penting ke depan.

Di Kelurahan Krembangan Utara, pelaksana utama adalah Kasi Kesra, dibantu oleh staf kelurahan dan kader Surabaya Hebat. Peran mereka meliputi pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, hingga pemantauan perkembangan usaha. Struktur pelaksana tidak seformal seperti di beberapa wilayah lain, namun tetap berjalan melalui koordinasi lapangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak kelurahan Krembangan Utara, mendapatkan hasil:

*"...Kami dari kelurahan, terutama dari seksi kesejahteraan rakyat, memantau langsung penerima manfaat. Koordinasinya dilakukan dengan kader Surabaya Hebat, RT, dan RW. Kami juga survei setiap beberapa bulan untuk memperbarui data warga miskin. Kalau ada yang kondisinya sudah membaik, maka bantuannya dialihkan ke yang lebih membutuhkan..."(hasil wawancara 3 juni 2025).*

Struktur pelaksana di Krembangan Utara lebih informal dan bergantung pada kapasitas individu pejabat kelurahan dan mitra sosial. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan program dapat berjalan, efektivitasnya dibatasi oleh minimnya sumber daya manusia dan kelembagaan. Kapasitas pelaksana yang tidak optimal sering kali menjadi faktor kegagalan dalam mengelola dinamika di lapangan, seperti kebutuhan pelatihan, fluktuasi modal, atau pemasaran (Novanto & Wibawani, 2023). keberhasilan program juga sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam menyediakan pelatihan dan penguatan kapasitas peserta. Kurangnya pelatihan atau pendampingan usaha menjadi salah satu faktor yang membuat banyak rombongan tidak produktif dalam jangka panjang.

### **3. Kelompok Sasaran**

Kesesuaian antara kelompok penerima manfaat dan organisasi pelaksana merujuk pada kecocokan antara persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi untuk memperoleh hasil dari program dengan kemampuan kelompok sasaran dalam memenuhinya. Agar program dapat menghasilkan output yang optimal, diperlukan keselarasan antara ketentuan organisasi dan kapasitas dari kelompok sasaran. Fokus utama dalam

aspek ini adalah memastikan bahwa program tepat sasaran, baik dari segi penentuan penerima manfaat maupun dalam pelaksanaannya.

Program padat karya di Tanjung Perak menysasar warga miskin, pra-sejahtera, dan sebelumnya juga mencakup warga miskin ekstrem. Kriteria klasifikasi dilakukan berdasarkan penghasilan dan kepemilikan aset produktif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak kelurahan tanjung perak, mendapatkan hasil bahwa program padat karya sudah tepat sasaran dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak kelurahan Tanjung Perak, mendapatkan hasil:

*"...warga miskin itu penghasilan di bawah satu juta, dan yang warga pra Sejahtera berpenghasilan di atas satu juta... Apabila warga itu sudah punya kulkas, sepeda motor dan HP itu di angkat menjadi pra Sejahtera..." (hasil wawancara 22 april 2025).*

Program juga bersifat inklusif, di mana tidak ditemukan penolakan dalam pendataan. Hambatan partisipasi lebih disebabkan faktor teknis, seperti sudah bekerja atau mengasuh anak. Keberhasilan sebuah program sangat ditentukan oleh sejauh mana kecocokan antara pihak pelaksana dan kelompok sasaran dapat tercapai, khususnya dalam hal kemampuan organisasi menetapkan kriteria yang selaras dengan kondisi dan kapasitas target penerima manfaat. Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa program telah menjangkau kelompok sasaran secara tepat dan sesuai. Namun, efektivitas jangka panjang perlu didukung dengan penguatan kapasitas ekonomi dan keterampilan warga untuk menciptakan kemandirian yang berkelanjutan.

Di Krembangan Utara, proses penetapan sasaran dilakukan melalui survei lapangan bersama KSH, RT/RW, dan tim kelurahan. Kriteria utama adalah masyarakat miskin (gakin/gamis) yang sudah memiliki kemampuan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak kelurahan Krembangan Utara, mendapatkan hasil:

*"...Penerima bantuan adalah warga yang tergolong gakin (keluarga miskin), tapi bukan sembarang miskin. Kami lihat dulu apakah dia memang sudah punya usaha atau skill. Kalau belum punya usaha, kita tunda dulu bantuannya. Tapi kalau sudah ada usaha dan rombongnya tidak layak, baru kita bantu..."* (hasil wawancara 3 juni 2025).

Pendekatan ini menunjukkan bahwa program padat karya di Krembangan Utara sudah cukup tepat sasaran, sebagaimana ditekankan dalam teori Korten. Namun demikian, tantangan utama muncul ketika modal usaha tidak dapat diputar oleh penerima, mengakibatkan usaha macet dan rombongan tidak dipakai. Karena bantuan berupa hibah, tidak ada mekanisme penarikan jika penerima tidak memanfaatkannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun seleksi sasaran sudah sesuai, tidak adanya mekanisme kontrol pasca bantuan menjadi kelemahan.

## SIMPULAN

Program padat karya di kecamatan Pabeancantikan pada dasarnya telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Program ini memberikan bantuan dalam bentuk rombongan dan perlengkapan usaha yang menyasar warga miskin yang memiliki keterampilan atau usaha kecil. Namun efektifitas program masih terkendala oleh terbatasnya modal lanjutan, lemahnya pengelolaan usaha, dan belum optimalnya strategi pemasaran. Dari sisi organisasi pelaksana, Pelaksanaan sudah berjalan melalui koordinasi antara staf kelurahan Kesra, RT/RW, BAZNAS dan Kader Surabaya Hebat. Sementara itu, kelompok sasaran telah ditetapkan secara tepat berdasarkan kriteria ekonomi dan kesiapan usaha, namun tidak adanya mekanisme pasca bantuan menyebabkan beberapa usaha mengalami stagnasi. Dengan demikian meskipun program sudah berjalan sesuai arah kebijakan, aspek

keberlanjutan dan pendampingan masih perlu diperkuat.

Agar program padat karya dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, pemerintah perlu meningkatkan pendampingan dan pelatihan usaha bagi penerima manfaat, terutama dalam manajemen usaha dan pengelolaan keuangan. Selain itu penyediaan skema modal bergulir atau bantuan tambahan berbasis evaluasi usaha juga perlu dipertimbangkan. Organisasi pelaksana di tingkat kelurahan perlu diperkuat melalui pelatihan dan pembentukan struktur tim yang lebih formal. Pemerintah juga perlu memfasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha masyarakat, baik melalui platform digital maupun kegiatan bazar lokal. Serta perlu adanya sistem evaluasi berkala pasca bantuan untuk memastikan bahwa program benar-benar memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi penerima manfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna, Ed.; 1st ed.). Syakir Media Press.

Bahri, S., Bedjo Sujanto, Mp., & Madhakomala, Mp. R. (2020). *MODEL IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBAGA PENJAMINAN MUTU*.

[www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

BKKBN. (2017, September 15). *Kampung KB Insan Madani*. [Kampungkb.Bkkbn.Go.Id](http://Kampungkb.Bkkbn.Go.Id).

Hardinandar, F. (2019). Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) DETERMINAN KEMISKINAN (STUDI KASUS 29 KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA) DETERMINANTS OF POVERTY (CASE STUDY 29 CITIES / DISTRICT IN PAPUA PROVINCE).

*Riset Ekonomi Pembangunan*, 4(1).<http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP>

'Izzah, Z., & Hertati, D. (2024). Implementasi Program Padat Karya dalam Pengurangan Pengangguran di Kota Surabaya: Sebuah Analisis Berdasarkan Model David C. Korten. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*,

- 6(1), 91–  
 100. <https://doi.org/10.52423/neores.v6i1.316>
- Kurnia, A. (2024). *Motif Warga Miskin Dalam Penolakan Program Padat Karya di Surabaya*. 13(2), 161–170.
- Masduki. (2023, May 20). *Jumlah Penduduk Kota Surabaya Terus Bertambah*. INewsSurabaya.Id.
- Nurzelanti, Y., Widiyanto, K., & Dida, R. (2024). Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Program Padat Karya di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *Jurnal Relasi Publik*, 1–1.
- Oktaviana, D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM KABUPATEN, DAN PENGANGGURAN, TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN MADIUN. *Syntax Idea*, 3(5), 1034. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i5.1183>
- Ramadhan. (2022, January 26). *30 Persen Masyarakat di Surabaya Berpenghasilan Rendah*. REPUBLIKA.CO.ID.
- Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7).
- Siyoto, Dr. S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup, Ed.). Literasi Media Publishing.
- Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus* (II). Nusamedia.
- Ummah, Yasin, & Azizi. (2023). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Khususnya Inflasi dan Pengangguran di Kota Surabaya. *Jurnal Manajemen Kreatif Dan Inovasi*, 1(3), 21– 34. <https://doi.org/10.59581/jmki-widyakarya.v1i3.445>